










IMPLIKASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Mica Siar Meiriza¹ , Natalya Anabel Manik² , Armalia Mawarni³ , Rizqi alhaq⁴ , Fran Mendrova Mikael⁵ , Zahira Annisa Fadina⁶ , Chairuna Ikhwan Br Nadeak⁷ , Jilika Putri Grasela Manullang⁸ , Yemima Nainggolan⁸ 

¹⁻⁸Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email penulis korespondensi: micasiarameiriza@gmail.com

Article Info

Submitted: May 16, 2026

Revised: June 02, 2026

Accepted: June 30, 2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher

Universitas Negeri
Medan

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is an Indonesian government policy launched on January 6, 2025, to improve the nutrition of students from early childhood education (PAUD) to high school/vocational school (SMA/SMK) levels. This study aims to analyze the impact of the MBG Program on the income and business sustainability of street vendors (PKL) in the SMKN 1 Percut Sei Tuan neighborhood, Deli Serdang Regency, North Sumatra. The study was conducted from February to April 2026 using a descriptive qualitative approach with data collection techniques through semi-structured interviews and observations of ten vendors selected by purposive sampling. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model with triangulation techniques to maintain data validity. The results showed that all informants experienced a significant decrease in income after the implementation of the MBG program, with decreases ranging from 35% to 70%. The greatest impact was felt by vendors selling heavy meals, while beverage and snack vendors experienced relatively mild decreases. In addition, there was a shift in the consumer base from students to the surrounding community, as well as the emergence of various adaptation strategies such as product innovation and the use of digital platforms. This study concludes that the MBG program has unintended secondary impacts on street vendors (PKL), necessitating a more inclusive policy that considers the sustainability of small-scale economic actors around schools.

Keywords: Free Nutritious Meal Program, street vendors, business sustainability, income, public policy

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025 untuk meningkatkan status gizi peserta didik mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program MBG terhadap pendapatan dan keberlangsungan usaha pedagang kaki lima (PKL) di lingkungan SMKN 1 Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penelitian dilaksanakan pada Februari hingga April 2026 menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi terhadap sepuluh pedagang yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman dengan teknik triangulasi untuk menjaga keabsahan data. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan setelah implementasi Program MBG, dengan tingkat penurunan berkisar antara 35% hingga 70%. Dampak terbesar dirasakan oleh pedagang yang menjual makanan berat, sedangkan pedagang minuman dan camilan mengalami penurunan yang relatif lebih ringan. Selain itu, terjadi pergeseran basis konsumen dari siswa ke masyarakat sekitar serta muncul berbagai strategi adaptasi, seperti inovasi produk dan pemanfaatan platform digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program MBG menimbulkan dampak sekunder yang tidak direncanakan terhadap pedagang kaki lima, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan keberlangsungan pelaku usaha mikro di sekitar lingkungan sekolah.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, pedagang kaki lima, pendapatan, keberlangsungan usaha, kebijakan publik

©2026; *How to Cite:* Implikasi Program Makan Bergizi Gratis terhadap Keberlangsungan Usaha Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Sekolah (M. S. Meiriza, N. A. Manik, A. Mawarni, R. Alhaq, F. M. Mikael, Z. A. Fadina, C. I. B. Nadeak, J. P. G. Manullang, & Y. Nainggolan, Trans.). (2026). *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 24(1), 141-148. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/view/73907>

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang mulai diimplementasikan secara nasional pada 6 Januari 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun (Kementerian Keuangan, 2025). Program ini menasar tahap awal 3 juta penerima manfaat (siswa PAUD hingga SMA/SMK, balita, ibu hamil, dan menyusui) melalui 190 dapur di 26 provinsi, dengan target akhir 82,9 juta orang (Espos News, 2025). MBG bertujuan meningkatkan status gizi pelajar, mengurangi angka stunting, serta mendukung kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 dengan pemberian makanan bergizi gratis dua kali sehari (Badan Gizi Nasional, 2025). Sasaran utama adalah siswa jenjang pendidikan dasar hingga menengah termasuk SMK yang memperoleh makanan sesuai RDA, mengatasi kelaparan 41% siswa sebelumnya (Husin et al., 2025). Meskipun membawa manfaat signifikan bagi penerima langsung seperti peningkatan

IMT dan kehadiran sekolah, program ini berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung bagi pelaku usaha kecil di lingkungan sekolah, khususnya pedagang kaki lima (PKL) (Gustino et al., 2026).

Pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar lingkungan sekolah merupakan salah satu kelompok pelaku usaha mikro yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah. Selama ini, siswa menjadi konsumen utama bagi PKL yang menjual makanan, minuman, dan jajanan di area sekolah. Dengan diterapkannya Program MBG, pola konsumsi siswa berpotensi mengalami pergeseran yang cukup signifikan dari yang sebelumnya membeli makanan secara mandiri dari PKL, menjadi menerima makanan yang telah disediakan oleh program pemerintah. Pergeseran ini tidak hanya mempengaruhi volume penjualan harian PKL, tetapi juga dapat mengancam keberlangsungan usaha mereka secara jangka panjang, terutama bagi mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan alternatif.

Hal ini sejalan dengan temuan Sugianto (2024) yang menunjukkan bahwa

kebijakan pemerintah yang secara langsung menyentuh pola konsumsi masyarakat seperti program bank sampah berbasis green economy terbukti memberikan dampak nyata terhadap struktur pendapatan kelompok ekonomi bawah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa intervensi kebijakan tidak hanya berdampak pada pihak yang menjadi sasaran langsung program, tetapi juga berimbas pada ekosistem ekonomi di sekitarnya, termasuk pelaku usaha mikro yang bergantung pada aktivitas komunitas setempat. Dalam konteks yang serupa, Program MBG sebagai kebijakan yang mengintervensi pola konsumsi siswa di sekolah diduga kuat turut mempengaruhi pendapatan dan keberlangsungan usaha PKL yang beroperasi di sekitar lingkungan sekolah.

Dugaan ini bukan tanpa dasar empiris. Hermawati, Abdullah, dan Rizaldi (2025) menemukan bahwa sejak MBG diterapkan di salah satu SMA Negeri, seluruh pedagang kantin yang diteliti mengalami penurunan pendapatan, dengan dampak paling tajam dirasakan pada penjualan makanan berat. Lebih jauh, tidak satu pun pedagang yang merasa dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan tersebut, sehingga menciptakan ketegangan antara kepentingan program pemerintah di satu sisi dan kelangsungan ekonomi pedagang di sisi lain. Kondisi serupa sangat mungkin dialami oleh PKL di sekitar sekolah, mengingat keduanya sama-sama bergantung pada pola konsumsi siswa yang kini telah bergeser akibat program MBG.

Lebih lanjut, Gapari (2023) dalam penelitiannya tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pendapatan petani tembakau di Desa Batu Nampar secara kuantitatif membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara kebijakan pemerintah dan tingkat pendapatan pelaku usaha kecil. Dengan koefisien regresi bernilai positif ($\hat{Y} = 14,5 + 2,8X$) dan nilai t-hitung (6,054) yang melampaui t-tabel (2,797) pada taraf signifikansi 5%,

penelitian tersebut mempertegas bahwa setiap perubahan kualitas kebijakan pemerintah berkorelasi secara langsung dan terukur dengan perubahan pendapatan kelompok usaha yang terdampak. Temuan ini menjadi landasan penting untuk menduga bahwa implementasi Program MBG pun berpotensi memberikan pengaruh yang terukur, baik positif maupun negatif, terhadap pendapatan PKL di lingkungan sekolah. Namun demikian, kajian empiris yang secara khusus menganalisis dampak Program MBG terhadap PKL sebagai pelaku usaha di lapisan paling bawah ekosistem ekonomi sekolah masih sangat terbatas, sehingga kesenjangan ini perlu diisi melalui penelitian yang lebih terfokus dan kontekstual.

Bertolak dari kesenjangan tersebut, SMKN 1 Percut Sei Tuan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan terbesar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang telah menjadi salah satu pelaksana awal Program MBG. Keberadaan sejumlah PKL yang telah lama berjualan di sekitar sekolah tersebut menjadikannya lokasi yang representatif untuk mengkaji dampak langsung kebijakan ini terhadap pendapatan dan keberlangsungan usaha mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap pendapatan dan keberlangsungan usaha pedagang kaki lima di lingkungan SMKN 1 Percut Sei Tuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya terkait dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pendapatan dan kelangsungan usaha pedagang kaki lima (PKL) di lingkungan SMKN 1 Percut Sei Tuan.

Penelitian dilaksanakan selama dua bulan di SMKN 1 Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Februari hingga April 2026.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Kriteria yang digunakan adalah pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar sekolah dan diduga terdampak langsung oleh pelaksanaan program MBG. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman informasi daripada jumlah responden.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait perubahan pendapatan, jumlah pembeli, serta kondisi usaha sebelum dan sesudah pelaksanaan program MBG. Selain itu, dilakukan observasi langsung untuk melihat kondisi nyata aktivitas jual beli di lapangan.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya.

HASIL

Hasil Temuan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap sepuluh pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar lingkungan SMKN 1 Percut Sei Tuan, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pendapatan dan keberlangsungan usaha mereka. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan

model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan yang diperoleh kemudian diinterpretasi menggunakan teori dampak kebijakan William N. Dunn (2003), yang membedakan antara dampak yang diharapkan (*intended impacts*) dan dampak yang tidak diharapkan (*unintended impacts*), serta dampak primer yang dirasakan langsung oleh sasaran kebijakan dan dampak sekunder yang dirasakan oleh kelompok di luar sasaran. Dalam konteks penelitian ini, PKL merupakan kelompok yang menanggung dampak sekunder yang tidak diharapkan dari program MBG

Penurunan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Program MBG

Seluruh informan dalam penelitian ini menyatakan mengalami penurunan pendapatan setelah Program MBG mulai berjalan di SMKN 1 Percut Sei Tuan. Penurunan ini tidak bersifat marginal, melainkan cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi sebelum program diterapkan. Rata-rata pendapatan harian informan sebelum MBG berkisar antara Rp 260.000 hingga Rp 450.000, namun setelah program berjalan angka tersebut turun menjadi Rp 100.000 hingga Rp 300.000 per hari, atau terjadi penurunan sekitar 35% hingga 70% tergantung jenis dagangan masing-masing.

Ibu Imelda, pemilik usaha Stefani Cell yang juga menjual jajanan, mengungkapkan perbedaan yang sangat terasa antara kondisi sebelum dan sesudah program berjalan. Ia menuturkan: "Kalau dibilang turun, ya turun... dulu sehari bisa sampai 350 ribu bahkan 400 ribu. Sekarang paling ya 100 sampai 150 ribu." Penurunan serupa juga dialami oleh Bapak Rahman penjual mie ayam, yang menyatakan bahwa pendapatannya kini hanya berkisar Rp 180.000–200.000, turun dari sebelumnya

yang bisa mencapai lebih dari Rp 300.000 per hari: "Memang terasa kali bedanya sejak ada makan gratis itu."

Temuan ini sejalan dengan pandangan Dunn (2003) bahwa implementasi kebijakan publik seringkali menghasilkan dampak sekunder yang tidak direncanakan, terutama bagi kelompok yang secara tidak langsung terhubung dengan sasaran kebijakan. PKL di sekitar sekolah tidak pernah menjadi bagian dari perhitungan kebijakan MBG, namun justru menjadi pihak yang paling merasakan pergeseran pola konsumsi siswa sebagai akibat dari program tersebut

Penurunan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Program MBG

Meskipun seluruh informan mengalami penurunan pendapatan, intensitas dampak yang dirasakan tidak seragam. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual, khususnya apakah produk tersebut berkategori makanan berat, minuman, atau camilan/jajanan ringan.

PKL yang menjual makanan berat seperti nasi kuning, mie ayam, dan martabak mini mengalami penurunan paling tajam. Hal ini logis mengingat program MBG menyediakan makanan lengkap bergizi bagi siswa sehingga kebutuhan mereka terhadap makanan berat dari PKL menjadi berkurang drastis. Ibu Rina penjual nasi kuning menyampaikan: "Memang ada penurunan, tapi nggak terlalu parah kali. Dulu bisa Rp 280.000–360.000 sehari, sekarang sekitar Rp 160.000–210.000." Ia masih tertolong oleh konsumen pagi dari kalangan pekerja yang membeli nasi bungkus sebelum jam sekolah dimulai.

Sementara itu, PKL yang menjual minuman dan camilan mengalami penurunan yang relatif lebih ringan. Bapak Joko penjual minuman es menuturkan bahwa meski siang hari kini lebih sepi, segmen malam dari kalangan anak kos masih cukup membantu: "Kalau siang

memang agak sepi sekarang, beda kali sama dulu. Dulu sehari bisa sampai Rp 400.000–450.000, sekarang paling tinggal Rp 250.000–300.000. Tapi malam masih lumayan." Ibu Sari penjual gorengan juga menyatakan hal serupa, bahwa produk camilan masih diminati karena tidak sepenuhnya tergantikan oleh menu MBG: "Alhamdulillah masih jalan, walaupun ya turun juga. Dulu bisa 300 ribu lebih, sekarang paling 150 ribuan lah."

Pola ini mengonfirmasi bahwa dampak sekunder kebijakan MBG bersifat diferensial — tidak merata di antara PKL — bergantung pada seberapa langsung produk mereka bersaing dengan atau tergantikan oleh menu yang disediakan program. Dunn (2003) menegaskan bahwa dampak kebijakan perlu diukur tidak hanya secara agregat, tetapi juga pada kelompok-kelompok spesifik yang terpengaruh secara berbeda-beda, karena kebijakan yang sama dapat menghasilkan konsekuensi yang sangat bervariasi bergantung pada posisi setiap aktor dalam ekosistem yang dipengaruhi kebijakan tersebut.

Penurunan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Program MBG

Di tengah penurunan pembeli dari kalangan siswa, sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka masih dapat bertahan karena adanya segmen konsumen lain yang tidak terpengaruh program MBG, yakni warga sekitar, anak kos, dan pekerja di lingkungan sekolah. Ibu Imelda mengungkapkan: "Saya masih bersyukur sih, soalnya bukan cuma anak sekolah yang beli, ada juga anak kos sama warga sekitar. Jadi nggak terlalu jatuh kali lah."

Selain mengandalkan segmen konsumen alternatif, sejumlah informan juga secara aktif melakukan inovasi produk untuk menarik kembali perhatian siswa. Ibu Sari mengadaptasi dagangannya dengan mengikuti tren makanan viral: "Saya sekarang ikut-ikutan tren, jual gorengan yang

lagi viral, kayak mozzarella itu. Anak-anak suka ternyata." Bapak Rahman menempuh langkah yang lebih jauh dengan mendaftarkan usahanya ke platform pesan antar daring: "Saya pun harus putar otak, sekarang saya tambah jual nasi sama daftar ke GoFood sama GrabFood. Lumayanlah, ada tambahan dari situ."

Meski demikian, seluruh informan sepakat untuk tidak menurunkan harga jual sebagai strategi bertahan, mengingat harga bahan baku justru terus meningkat. Bapak Andre penjual martabak mini menyatakan: "Harga nggak saya turuin, telur mahal sekarang." Keengganan untuk menurunkan harga ini mencerminkan tekanan ganda yang dihadapi PKL: di satu sisi permintaan dari siswa menyusut, di sisi lain biaya produksi terus meningkat — sebuah kondisi yang semakin mempersempit ruang gerak ekonomi mereka.

Kondisi ini menegaskan bahwa dampak kebijakan MBG terhadap PKL tidak sekadar berdimensi pendapatan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku usaha yang signifikan. Dalam kerangka Dunn (2003), respons adaptif yang dilakukan oleh PKL ini dapat dipahami sebagai upaya kelompok terdampak untuk meminimalkan konsekuensi negatif dari dampak kebijakan yang tidak mereka antisipasi sebelumnya.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini secara keseluruhan mengkonfirmasi bahwa Program MBG menghasilkan dampak sekunder yang tidak direncanakan terhadap PKL di sekitar SMKN 1 Percut Sei Tuan, sebagaimana dikerangkakan oleh Dunn (2003) dalam konsep *unintended impacts* dari

implementasi kebijakan publik. Program yang dirancang semata untuk meningkatkan gizi siswa pada kenyataannya turut mengubah ekosistem ekonomi di lingkungan sekolah secara signifikan, khususnya bagi kelompok pelaku usaha yang selama ini menggantungkan pendapatannya pada pola konsumsi siswa.

Penurunan pendapatan yang dialami seluruh informan berkisar antara 35% hingga 70% merupakan angka yang tidak dapat diabaikan, terutama mengingat PKL adalah pelaku usaha mikro tanpa jaring pengaman ekonomi yang memadai. Kondisi ini sejalan dengan temuan Hermawati, Abdullah, dan Rizaldi (2025) yang mendokumentasikan penurunan pendapatan serupa pada pedagang kantin sekolah pasca implementasi MBG, di mana seluruh pedagang yang diteliti menyatakan bahwa kebijakan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan mereka. Persamaan temuan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif MBG terhadap pedagang di lingkungan sekolah bukan merupakan fenomena yang bersifat lokal atau kasuistik, melainkan sebuah pola yang berulang di berbagai konteks sekolah yang menerapkan program ini.

Yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa dampak tersebut tidak bersifat seragam, melainkan sangat ditentukan oleh jenis dagangan yang dijual. PKL yang menjual makanan berat menanggung beban paling besar karena produk mereka paling langsung bersaing dan tergantikan oleh menu MBG. Sementara itu, PKL yang menjual minuman dan camilan masih memiliki ruang gerak yang lebih luas

karena produk mereka mengisi ceruk konsumsi yang berbeda dan tidak sepenuhnya tercakup dalam paket MBG. Pola diferensiasi dampak ini penting untuk dipahami oleh pembuat kebijakan, karena implikasinya adalah bahwa tidak semua PKL membutuhkan jenis intervensi yang sama dalam merespons dampak program ini.

Di sisi lain, respons adaptif yang ditunjukkan para informan mulai dari inovasi produk, perluasan segmen pasar, hingga pemanfaatan platform daring mencerminkan resiliensi ekonomi yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro dalam menghadapi tekanan eksternal. Wisdasari dan Ikhwan (2024) dalam studinya tentang adaptasi PKL terhadap perubahan jam operasional berdagang di Pasar Raya Padang menemukan pola serupa, di mana PKL secara kreatif mencari alternatif cara bertahan ketika kebijakan membatasi ruang usaha mereka. Hal ini menunjukkan bahwa PKL pada dasarnya memiliki kapasitas adaptif, namun kapasitas tersebut memiliki batas terutama ketika tekanan berlangsung dalam jangka panjang dan disertai oleh kenaikan biaya produksi yang terus-menerus.

Tekanan ganda yang dihadapi PKL dalam penelitian ini, yakni penyusutan permintaan dari siswa di satu sisi dan kenaikan harga bahan baku di sisi lain, menempatkan mereka dalam posisi yang sangat rentan secara ekonomi. Keengganan seluruh informan untuk menurunkan harga jual bukan semata keputusan bisnis yang irasional, melainkan respons logis terhadap struktur biaya yang tidak lagi memberikan ruang untuk kompetisi berbasis harga. Kondisi ini mengingatkan pada temuan Gapari (2023) yang membuktikan bahwa

perubahan kebijakan pemerintah berkorelasi langsung dan terukur dengan perubahan pendapatan kelompok usaha kecil, dan bahwa dampak tersebut seringkali tidak proporsional beban terbesar justru ditanggung oleh mereka yang paling sedikit memiliki akses terhadap sumber daya alternatif.

Dari perspektif kebijakan publik, temuan ini menggarisbawahi pentingnya apa yang oleh para ahli kebijakan disebut sebagai *policy impact assessment* yang inklusif, yakni penilaian dampak kebijakan yang tidak hanya berfokus pada kelompok sasaran langsung, tetapi juga memperhitungkan kelompok-kelompok yang secara tidak langsung akan terdampak. Absennya mekanisme semacam ini dalam implementasi MBG di SMKN 1 Percut Sei Tuan sebagaimana tercermin dari tidak adanya sosialisasi, kompensasi, maupun pelibatan PKL dalam perencanaan program menjadikan PKL sebagai pihak yang menanggung biaya sosial dari sebuah kebijakan yang tidak pernah mereka ikut rancang dan tidak pernah mereka setuju.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di sekitar SMKN 1 Percut Sei Tuan. Seluruh informan mengalami penurunan pendapatan harian antara 35% hingga 70%, dengan dampak paling tajam dirasakan oleh PKL yang menjual makanan berat, sementara PKL yang menjual minuman dan camilan mengalami penurunan yang relatif lebih ringan karena produk mereka tidak sepenuhnya tergantikan oleh menu program.

PKL terbukti merupakan kelompok yang menanggung dampak sekunder yang tidak direncanakan dari kebijakan ini. Program yang dirancang untuk meningkatkan gizi siswa secara tidak langsung telah menggeser pola konsumsi siswa sebagai basis utama pendapatan PKL, tanpa disertai mekanisme perlindungan maupun kompensasi bagi pihak yang terdampak. Meski PKL menunjukkan resiliensi melalui inovasi produk dan perluasan segmen konsumen, kapasitas adaptif ini memiliki batas ketika tekanan penurunan permintaan berlangsung bersamaan dengan kenaikan harga bahan baku.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan implementasi yang lebih inklusif, mencakup pelibatan PKL dalam perencanaan program, pemberian kompensasi bagi pedagang yang terdampak, serta evaluasi berkala terhadap dampak program pada ekosistem ekonomi di sekitar sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Gizi Nasional. (2025). *BGN akan memulai program MBG secara bertahap*. <https://www.bgn.go.id/news/artikel/bgn-akan-memulai-program-mbg-secara-bertahap>
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis kebijakan publik* (Edisi kedua). Gadjah Mada University Press.
- Espos News. (2025). *Hari ini, program makan bergizi gratis mulai bergulir di 26 provinsi*. <https://news.espos.id/hari-ini-program-makan-bergizi-gratis-mulai-bergulir-di-26-provinsi-2044917>
- Gapari, M. (2023). Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pendapatan petani tembakau di Desa Batu Nampar. *MANAZHIM*, 5(1), 456–474. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i1.2871>
- Gustino, R., et al. (2026). Dampak program makan bergizi gratis (MBG) terhadap pedagang kantin dan UMKM di sekitar sekolah. *Suara Usu*. <https://suarausu.or.id/dampak-program-makan-bergizi-gratis-mbg-terhadap-pedagang-kantin-dan-umkm-di-sekitar-sekolah/>
- Hermawati, L., Abdullah, M., & Rizaldi, M. (2025). Dampak kebijakan makan bergizi gratis pada pedagang kantin: Sebuah analisis teori konflik Max Weber. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10.D), 155–160. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11814>
- Husin, M. H., et al. (2025). Program makan bergizi gratis (MBG) dan dampaknya terhadap pedagang kaki lima. *Jurnal Ilmiah Kependidikan Mandiri*, 9(4), 80–83. <https://ojs.ubesco.com/index.php/ji/article/download/750/892>
- Kementerian Keuangan. (2025). *MBG tingkatkan target penerima jadi 82,9 juta orang*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/mbg-tingkatkan-target-penerima-jadi-829-juta-orang>

Sugianto. (2024). Dampak kebijakan pemerintah dalam mendorong green economy berbasis bank sampah terhadap tingkat pendapatan masyarakat di Indonesia. *Journal Economy Management Business and Entrepreneur*, 2(2), 1–11